

## **ABSTRAK**

### **KOORDINASI ANTARA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR, DINAS TATA KOTA DAN PARIWISATA, DAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA METRO DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA METRO**

**Oleh**

**NOVIA BELLADINA**

Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan aktivitasnya melalui koordinasi antar aparaturanya. Koordinasi dilakukan dengan maksud agar pemerintah Kota Metro dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini Kota Metro melakukan koordinasi antar instansi yang ada didaerahnya dalam rangka memenuhi salah satu program pembangunannya yaitu penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Permasalahan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Metro sampai saat ini belum teratasi dengan baik walaupun telah dilakukan upaya untuk mengatasi kesemerawutan tersebut. Tidak tertatanya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah kompleks karena selain merusak keindahan dan melanggar estetika ruang kota, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dapat menimbulkan kemacetan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi Antara Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Tata Kota dan Pariwisata, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Metro. Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan tergolong penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data melalui wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak terkait kemudian didukung dengan observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Tata Kota dan Pariwisata dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro sebagian besar terlaksana. Meskipun demikian, terdapat

indikator yang belum tercapai secara maksimal, yakni Kesepakatan dan Komitmen.

Kata kunci : Koordinasi, penertiban PKL